

## Strategi *Marketing* Politik Dpd Partai Gerindra Jawa Barat Melalui Sayap Pira Pada Pemilu 2024

Widdy Yuspita Widiyaningrum <sup>1)\*</sup>, Fuziah Nur Alifah <sup>2)</sup>,

<sup>1)2)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

\* Korespondensi Penulis. E-mail: [widdyuspita12@gmail.com](mailto:widdyuspita12@gmail.com)  
[nuralifahfuziah@gmail.com](mailto:nuralifahfuziah@gmail.com)

### Abstrak

Kesenjangan gender di dalam dunia politik masih sering terjadi, maka dari itu diperlukannya pelaksanaan yang efektif UU mengenai keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Sayap partai PIRA merupakan wadah bagi kaum perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik yang menjadi perwakilan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian terkait strategi *marketing* politik sayap partai PIRA untuk memenuhi kuota *affirmative action* sebanyak 30% pada pemilihan umum 2024 mendatang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sayap partai PIRA mewujudkan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Subjek penelitian utama adalah perwakilan partai, anggota PIRA, dan *representative* PIRA dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Partai Gerindra melalui sayap partai PIRA melakukan pendekatan melalui media *online* dan *offline* berbentuk pengabdian kepada masyarakat serta adanya sosok figur dari Prabowo yang menunjang besarnya suara yang akan didapat pada pemilihan umum 2024 mendatang.

**Kata kunci:** Strategi, *Marketing* Politik, Kesenjangan Gender, Keterwakilan Perempuan.

## *West Java Gerindra Party's Dpd Political Marketing Strategy Through The Pira Wing In The 2024 Election*

### Abstract

*Gender disparity within the political sphere continues to persist. Therefore, the effective implementation of a law regarding the representation of women at a rate of 30% is necessary. The Gerindra's woman under bow, PIRA (Perempuan Indonesia Raya), serves as a platform for women to enter the political arena and function as representatives of society. Based on this premise, the researcher conducted a study on the political marketing strategies employed by the PIRA to meet the 30% affirmative action quota in the upcoming 2024 general elections. The objective of this research is to determine the extent to which the PIRA achieves 30% female representation in politics. This study adopts a qualitative methodology with a narrative approach. The primary research subjects include party representatives, PIRA members, and PIRA representatives, selected through purposive sampling techniques. The research findings indicate that the Gerindra Party, through the PIRA, employs approaches such as online and offline media engagement, community service, and the influential presence of Prabowo to garner significant support in the upcoming 2024 general elections.*

**Key word:** Strategy, Political Marketing, Gender Disparity, Woman's Representative.





## PENDAHULUAN

Demokrasi menjadi suatu pilihan sistem politik di mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah, yaitu pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Novianti, Cora Elly (2013). Dengan adanya pemahaman seperti itu, tentunya akan menciptakan peraturan yang di mana dapat memberikan manfaat dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukannya regulasi bersama yang memberikan dukungan dan menjadi dasar yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan untuk menjamin serta melindungi hak-hak masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi, pada dasarnya prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu serta menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang. Latuconsina, Nuraini. (2013)

Pada dasarnya dalam prinsip konstruksi demokrasi di dalam sistem politik Indonesia, sebagaimana di negara-negara modern lainnya adalah menggunakan sistem perwakilan (*representative democracy*). Hal tersebut untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur dalam sistem perwakilan (*representative*) diperlukannya mekanisme pemilihan umum yang

diselenggarakan secara berkala, sehingga demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang melayani kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar berjalan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui Pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Triono (2017). Seiring dengan berkembangnya zaman dan adanya perubahan paradigma di mana dalam pemilihan umum untuk saat ini keterwakilan perempuan menjadi salah satu aspek yang patut dipertimbangkan dalam proses pemilihan umum. Adanya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum turut menjadi sebuah permasalahan, jika dilihat kembali apa yang dimaksudkan dengan keterwakilan perempuan itu sendiri menurut Rasyidin dan Aruni (2018) menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Pentingnya keterwakilan ini juga sebagaimana didasarkan pada UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan hal serupa mengenai pentingnya keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai ataupun





bakal calon anggota legislatif. Hal tersebut merupakan langkah positif dalam mendukung partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, adil (kesetaraan *gender*), dan *representatif*.

Adapun konsep kesetaraan *gender* telah meluas dan berkembang sedemikian rupa sehingga turut berpengaruh pula pada reformasi di Indonesia. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh reformasi berkaitan dengan sistem yang bertujuan agar perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata di segala bidang, salah satunya adalah dalam bidang politik.

Jumlah perempuan sebagai anggota parlemen di Indonesia masih tergolong rendah Pada periode 2014-2019, total anggota DPR perempuan hanya 17 persen. Namun pada periode 2019-2024, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI meningkat menjadi sekitar 21 persen, hal tersebut dikarenakan masih terdapat kesenjangan gender. Salah satunya dalam akses pendidikan di mana meskipun pendidikan kini sudah semakin merata, tetapi masih ada banyak perempuan yang tidak mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki.

Hal ini bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang masih memandang perempuan sebagai pengasuh dan mengabaikan pendidikan sebagai prioritas. Salah satunya dengan rendahnya partisipasi dari perempuan dilihat menurut Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah – Deputy Bidang Kesetaraan *Gender* tahun 2022 dalam capaian Indeks Pemberdayaan *Gender* (IPG) pada tahun 2021 bahwa perempuan yang duduk di parlemen masih jauh dibandingkan dengan laki-laki yaitu 21,89 persen berbanding 78,11 persen yang di mana mengakibatkan kurang tersalurnya beberapa kepentingan dari sejumlah perempuan mengenai keputusan politik.

Apabila dilihat dari peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan 30 persen keterwakilan perempuan pada urusan politik tingkat pusat dan pencalonan legislatif setiap tingkatannya, dengan hal tersebut maka perempuan dan laki-laki mempunyai tempat masing-masing untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Namun pada faktanya, jika dilihat data di Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan hasil pemilu tahun 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional atau DPR RI berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Artinya amanat peraturan dari UU tersebut belum juga terpenuhi. Walaupun masih belum mencapai target keterwakilan 30 persen perempuan, namun persentase ini meningkat pesat dari Pemilu RI pertama yang persentase perempuannya hanya 5,88 persen. Agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik dalam mengatasi fenomena tersebut, peran politik dalam membentuk kesadaran demokrasi di kalangan warga negara menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kreativitas





warga sebagai sumber daya politik yang kuat, serta memastikan transfer atau implementasi nilai-nilai hukum dan moral.

Adapun dalam hal ini salah satu partai di Indonesia yang telah melaksanakan fungsi partai yang baik adalah Partai Gerindra. Hal tersebut terlihat dari adanya keaktifan Partai Gerindra dalam melibatkan kaum muda dan wanita untuk memaksimalkan fungsi rekrutmen dalam fungsi partai. Di mana tentunya hal tersebut memberikan haluan baru serta harapan baru untuk mencapai sistem politik yang demokratis salah satunya melalui pendidikan politik yang ditentukan jangka waktunya.

Adapun pada akhirnya dengan adanya kebutuhan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, Partai Gerindra berfungsi untuk menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sayap-sayap partai. Sebagaimana disebut dalam Pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa “organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai AD dan ART masing-masing Partai Politik.” Panjaitan, Marojahan JS. (2019).

Sayap partai yang berada di Partai Gerindra cukup banyak dengan masing-masing memiliki tugas yang berbeda salah satunya PIRA (Perempuan Indonesia Raya). Hal ini dapat ditandai dengan alasan Partai Gerindra membentuk sayap partai PIRA (Perempuan Indonesia Raya) karena perempuan Indonesia memiliki potensi untuk berperan strategis di tengah masyarakat yang di mana memiliki ketangguhan dan inisiatif untuk bangkit menopang keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosial, budaya, dan perekonomian baik di tingkat pedesaan maupun perkotaan. Hal tersebut dipertegas dalam data kependudukan Indonesia di tahun 2022 menunjukkan hampir 50 persen dari penduduk Indonesia yang berjumlah 135.576.278 jiwa adalah perempuan. Hal ini tentunya Partai Gerindra sadar akan pentingnya peranan perempuan dalam berpolitik karena didalam politik perlu akan adanya tiang dan tiang tersebut adalah perempuan. Bilamana tiang tersebut kokoh maka akan kokoh juga negaranya.

Penjelasan di atas telah memperlihatkan bahwa akan peranan perempuan dalam berpolitik itu penting. Dimana dapat mewakili dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Pemenuhan kebutuhan Partai Gerindra mengambil peran dari sayap partai melalui PIRA (Perempuan Indonesia





Raya) sebagai jawaban atas permasalahan kesenjangan gender melalui penelitian yang berjudul “Strategi *Marketing* Politik DPD Partai Gerindra Jawa Barat Melalui Sayap PIRA Pada Pemilu 2024”

## METODE

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Adapun pendekatan naratif digunakan untuk dapat fokus pada pengalaman dan kronologi individu secara lebih rinci serta dapat memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita (narasi) yang ia dengar ataupun tuturkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah. Sudaryono (2017). Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.

### Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DPD Partai Gerindra Jawa Barat mengenai Strategi *Marketing* Politik DPD Partai Gerindra Jawa Barat Melalui Sayap Partai Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Dalam Peningkatan Rekrutmen Kontestan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2024. Adapun waktu dalam

proses penelitian ini yaitu dari Bulan Maret hingga Juli 2023

### Target/Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, subjek penelitian ini ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan *sampel* sumber data dengan pertimbangan tertentu.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data merupakan salah satu bagian yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Perolehan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi (*triangulation*). Alasan menggunakan *triangulation* adalah bahwa tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang sangat cocok dan dapat benar-benar sempurna. Dalam banyak penelitian kualitatif, peneliti umumnya menggunakan teknik *triangulasi* dalam arti menggunakan *interview* dan observasi. Conny R, Semiawan. (2010).

### Teknik Analisis Data

Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data, yaitu data *reduction* data, *display* data, dan *conclusion drawing* atau *verification*. Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2008).





## HASIL PEMBAHASAN

Strategi *Marketing* Politik DPD Partai Gerindra Jawa Barat Melalui Sayap Partai Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Dalam Peningkatan Rekrutmen Kontestan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2024

### 1) *Product*

Produk (*product*) dalam hal ini berarti partai, kandidat dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan konstituen. Produk ini berisi konsep, identitas ideologi baik dimasa lalu maupun sekarang yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. Dalam menciptakan produk, maka sebuah partai politik harus menghasilkan produk yang mudah direkam dalam bentuk *image* yang terdapat dalam sistem kognitif konsumen. Dengan demikian, pemilih dapat membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu partai politik satu dengan produk atau jasa yang dihasilkan partai politik lainnya.

Pertama, adanya membangun rasa cinta terhadap negeri melalui proses pengabdian-pengabdian terhadap masyarakat. Rasa cinta terhadap negeri merupakan pondasi untuk memperkuat bangsa dan membentuk masa depan yang lebih baik. Salah satunya dalam bentuk pengabdian terhadap masyarakat melalui bakti sosial, pengobatan gratis, sunatan massal, pengadaan vaksin gratis, dan yang paling utama dalam membangun komunikasi dengan masyarakat yakni melalui jalur aspirasi dewan dalam membantu permasalahan

yang ada di Masyarakat salah satunya dengan membantu anak-anak yang kurang mampu dalam perekonomian untuk masuk ke sekolah yang diinginkan kemudian membantu masyarakat yang sulit mengakses kesehatan yang baik.



**Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan Sunatan Masal**

Kedua, melihat sosok figur partai tersebut. Dalam hal *marketing* politik bakal calon perempuan yang paling utama dilihat adalah figur dari sosok pemimpin partai tersebut. Figur seorang pemimpin yang paling utama dalam partai sangatlah penting dalam konteks mempengaruhi simpati masyarakat. Ada banyak hal yang dapat dilihat dari seseorang yang akan dipilih sebagai calon, misalnya orang tersebut mempunyai kedudukan sosial (popularitas) yang di mana signifikan di kalangan pendukungnya, ekonomi yang kuat dalam dorongan memberikan dukungan mobilisasi, pengalaman serta rekam jejak yang dikenal baik di arena politik nasional dan terakhir agama yang mampu memberikan arahan spiritual, menginspirasi, dan membimbing umatnya menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama.

## 2) *Promotion*

Promosi atau kampanye politik merupakan salah satu elemen kunci dalam strategi pemasaran politik untuk membentuk persepsi pemilih tentang calon dan pesan politik mereka. Melalui upaya promosi yang tepat, calon politik dapat mencapai pemilih dengan pesan dan informasi yang relevan, membangun kesadaran tentang diri mereka dan isu-isu penting, serta mempengaruhi persepsi pemilih terhadap diri mereka dan pesan politik yang mereka sampaikan. Dalam era demokrasi liberal dan pasar global, praktik politik tidak mau ketinggalan dengan produk lainnya, kampanye kandidat dan pemasaran program politik melalui media massa menjadi wacana yang menarik. Sumartias, Suwardi dan Santi Susanti. (2017).

Hal tersebut termasuk ke dalam bentuk komunikasi politik terutama dijalankan oleh media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Media massa memiliki peranan yang strategis dalam sistem politik. Kelancaran komunikasi politik melalui saluran yang dipilihnya akan sangat berpengaruh pada kemantapan kehidupan politik dan diperlukan dalam pembinaan sistem politik. Jadi komunikasi politik dalam hal ini pesan politik berlangsung secara timbal balik melalui saluran komunikasi yang efektif. Solihin, Olih (2018).

Adapun sayap Partai PIRA (Perempuan Indonesia Raya) yang sudah melakukan banyak hal bentuk-bentuk

promosi, baik itu secara langsung ataupun menggunakan media elektronik hingga media *online*. Penyebaran informasi tersebut merupakan peran dalam mempromosikan bahwa perempuan dapat berpolitik untuk kesetaraan gender.

Sebagaimana yang diungkapkan informan Prasetyawati selaku ketua PD PIRA Jawa Barat berikut ini:

“Sayap PIRA melakukan penyebaran pesan politik melalui proses penyusunan pesan, penggunaan media sosial, kampanye offline, kemitraan media, dan komunikasi dalam organisasi. Melalui proses-proses ini, organisasi sayap PIRA akan secara aktif menyebarkan pesan politik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran, memperoleh dukungan, dan memobilisasi pemilih dalam mendukung perempuan dalam politik dan memenuhi kuota 30%.”

Salah satu contoh bentuk promosi yang dilakukan oleh sayap partai PIRA yakni:



## Gambar 2 Contoh Penyebaran Pesan Politik Sayap Partai PIRA dalam Penggunaan Media Sosial

Penyebaran pesan politik harus sesuai dengan nilai-nilai dan isu-isu yang dianggap penting oleh pemilih target dan juga harus mencerminkan nilai-nilai calon dan partai politik. Pesan-pesan yang disampaikan melalui di media sosial tentunya memiliki dampak yang signifikan dalam proses politik. Sosial media memberikan kesempatan besar untuk partisipasi politik yang lebih luas, namun juga memunculkan tantangan terkait akurasi informasi, polarisasi, dan disinformasi. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan literasi media yang kuat, transparansi informasi, dan keterlibatan yang bertanggung jawab dalam penyebaran pesan politik di media sosial.

Adapun dalam hal ini PIRA sudah cukup optimal mempromosikan program-program yang ada di dalam PIRA tersebut. Hal ini tentunya membuka sebagian mata pendapat masyarakat mengenai perempuan dapat ikut serta dalam berpolitik serta sebagai upaya memenuhi keterwakilan perempuan 30% dan memastikan pesan tentang isu perempuan sampai ke masyarakat dengan efektif.

Adapun bentuk dari keberhasilan dengan adanya sayap partai PIRA sudah mencetak beberapa anggota dewan yang mewakili perempuan, namun itu belum cukup untuk memenuhi *affirmative action* dan akan dioptimalkan lebih baik

lagi melalui kemitraan dengan organisasi perempuan, pelatihan dan pendampingan, serta partisipasi dalam acara dan forum tentang isu perempuan.

### 3) *Price*

Dalam konteks politik, harga politik merupakan sejauh mana pemilih merasa bahwa calon atau partai politik tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka dan ini merupakan salah satu solusi yang relevan dan efektif dalam membangun hubungan yang positif dengan pemilih. Bilamana dikaitkan dengan kajian ilmu pemerintahan, ini mengacu pada kebijakan publik yang direncanakan atau diimplementasikan oleh pemerintah dan bagaimana dampaknya pada masyarakat.

Dalam harga tentunya mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Pada prinsipnya *cost politic* merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses kontestasi politik, akan tetapi besar dan kecilnya akan bergantung pada prinsip partai yang akan dijalankan oleh caleg-caleg perempuan.

#### a. Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi dalam PIRA terhadap caleg perempuan dalam pemilihan umum tahun 2024 pada penerapannya mempunyai prinsip gotong royong. Salah satunya untuk hal pembiayaan, umumnya berasal dari biaya pendanaan pribadi atau masyarakat yang secara sukarela membantu bergotong royong dalam perjuangan Gerindra. Namun,





dana tersebut digunakan kembali untuk keperluan persiapan kampanye ataupun kepentingan-kepentingan lainnya seperti seragam atribut dan lain-lain.

b. Nilai Psikologis

Nilai psikologis yang di mana pada dasarnya mengacu pada harga persepsi psikologis seperti adanya ketertarikan terhadap kandidat calon dengan latar belakang secara faktor *gender*, etnis, dan agama. Tentunya hal tersebut sayap partai Gerindra menciptakan *image* positif bagi caleg-caleg Perempuan untuk membawa perubahan kearah yang lebih baik.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan Wakil Sekretaris dalam bidang Litbang dan Kajian Pemilu DPD Partai Gerindra Jawa Barat Iyan Rohaeni bahwa:

“Strategi khusus yang dapat diterapkan meliputi komunikasi efektif, demonstrasi kemampuan dan kompetensi, perjuangan bersama, serta membangun kepercayaan melalui interaksi personal diharapkan kedepannya pemilih dapat yakin bahwa caleg perempuan memiliki potensi dan kualifikasi yang sama untuk mewakili aspirasi mereka.”

Hal tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk membangun keyakinan pemilih bahwa mereka memiliki potensi dan kualifikasi yang sama untuk mewakili aspirasi masyarakat. Semakin banyak perempuan yang terlibat dan merasa diwakili, semakin kuat dan beragam partai politik ini akan menjadi, dan semakin besar pengaruhnya dalam

menciptakan perubahan positif bagi masyarakat.

c. Citra Positif

Sayap PIRA selalu menekankan pentingnya semangat kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun, di samping aspek tersebut, kesiapan mental dan sumber daya finansial bagi calon anggota legislatif (caleg) juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam usaha menciptakan citra positif di mata masyarakat. Untuk membangun citra yang positif di mata masyarakat, selain melalui upaya sosialisasi mengenai program-program bantuan dan kegiatan, penting juga untuk menjaga sikap "kesantunan dan tatakrama" dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Sikap ini mencerminkan komitmen partai politik untuk berperan sebagai pelayan masyarakat dengan profesional dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, caleg perempuan memiliki peluang untuk membangun citra positif di mata masyarakat sebagai sosok yang kompeten, peduli, dan dapat dipercaya dalam mewakili kepentingan mereka. Jika caleg perempuan memiliki citra positif yang baik, hal ini dapat memberikan dampak positif pada partai politik secara keseluruhan.

4) *Place*

Penempatan (*Place*) merupakan kemampuan sebuah partai khususnya sayap partai PIRA (Perempuan Indonesia Raya) dalam berkomunikasi dengan para

pemilih (masyarakat) untuk menyebarkan produk politik. Konsep dari kata "penempatan" dalam politik mencakup cara calon atau partai menjangkau dan berinteraksi dengan pemilih. Dalam konteks segmentasi, masyarakat diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri spesifik yang dimilikinya. Dalam proses pembagian penempatan kembali kepada kebijakan internal di mana para pemangku kebijakan memiliki hak *prerogative* dalam hal tersebut tentunya tidak merta asal menempatkan seseorang karena tujuan dari itu adalah ingin para bacaleg menang dalam kompetensi tersebut.

Caleg perempuan dari Partai Gerindra khususnya melalui sayap partai PIRA (Perempuan Indonesia Raya) pada daerah pemilihan melakukan penyebaran daerah yang disesuaikan dengan kondisi, potensi serta kekuatan dukungan. Seperti yang diungkapkan informan Iyan Rohaeni Wakil Sekretaris di Bidang OKK berikut ini:

"Dalam memasang strategi penempatan tentu dilihat dari semua hal, kami memperhitungkannya dilihat atas dasar kemauan, domisili, kekuatan dukungan, penunjang kegiatan, serta strategi pemenangan lainnya."

Meskipun caleg memiliki kebebasan dalam memilih wilayah pemilihan berdasarkan pertimbangan mereka, tetap ada proses internal dalam partai politik yang harus diikuti.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi *marketing* politik yang dilakukan PIRA dapat dikatakan efektif dikarenakan adanya peningkatan partisipasi perempuan di ranah politik dalam mengikuti pemilu di tahun 2024. Hal ini dilihat dalam pemilu 2019 PIRA mengusuhkan sebanyak 58 caleg Perempuan, kemudian di pada tahun 2024 bertambah menjadi 83 caleg Perempuan di Jawa Barat. Penambahan jumlah caleg perempuan ini dapat dianggap sebagai indikasi efektivitas strategi marketing politik yang dilakukan oleh PIRA.

Dalam hal ini PIRA juga dapat dianggap sebagai terobosan untuk peningkatan partisipasi politik karena telah berhasil meningkatkan jumlah calon perempuan yang diusung, meningkatkan kesadaran publik tentang peran perempuan dalam politik, dan kemungkinan memperjuangkan isu-isu kesejahteraan dan kesetaraan gender, yang dapat membawa perubahan positif dalam kebijakan publik. Peningkatan partisipasi perempuan juga membantu menciptakan representasi yang lebih inklusif dalam politik.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Strategi *Marketing* Politik yang dilakukan Partai Gerindra melalui sayap partai PIRA (Perempuan Indonesia Raya) dalam memenuhi *affirmative action* maka dengan hal ini berdasarkan teori dari Niffenegger dalam buku Firmanzah



yakni Produk (*product*) menyebutkan bahwa pertama sayap partai PIRA harus membangun cinta terhadap negeri melalui pengabdian kepada masyarakat. Kedua, yang paling penting adalah strategi dengan melihat sosok figur pemimpin dari partai tersebut. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Partai Gerindra melalui sayap PIRA diharapkan dapat memperkuat representasi perempuan dalam politik dan memenuhi *affirmative action* yang diusungnya. Kemudian adapun Promosi (*promotion*) menyebutkan bahwa sudah dilakukan berbagai bentuk promosi baik secara *online* melalui media elektronik, media massa, ataupun sosial media dan secara *offline* melalui bentuk pengabdian masyarakat, bakti sosial, gotong royong dalam bencana seperti vaksin massal dan pengobatan gratis. Selanjutnya, Harga (*price*) menyebutkan bahwa pada dasarnya semua bentuk dukungan dan doa tentu ada namun untuk pembiayaan (*cost politic*) berasal dari biaya pribadi. Tetapi untuk menjadi sebuah pemimpin tentunya harus memiliki kompetensi, komitmen, etika, kemampuan komunikasi, dan representasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan partai. Maka hal tersebut dapat menunjang citra positif di masyarakat dengan menjalankan prinsip transparansi, integritas, responsif, partisipatif, kepemimpinan berkualitas, dan komunikasi efektif. Kemudian yang terakhir penempatan (*place*) menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam penempatan memiliki kriteria atas

dasar kemauan, domisili, kekuatan dukungan, kemampuan/kapasitas, penunjang kegiatan, strategi pemenangan lainnya dan *cost politic* yang disesuaikan dengan kemampuan finansial caleg. Dengan menerapkan strategi penempatan yang tepat, maka Partai Gerindra melalui sayap PIRA dapat memaksimalkan potensi perempuan dalam politik, memenuhi *affirmative action* yang diusungnya, dan meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga legislative melalui rekrutmen kontestan perempuan. Penempatan calon-calon yang tepat juga membantu partai dalam memperoleh dukungan lebih besar dari masyarakat dan mencapai tujuan politik yang diinginkan.

### Saran

- a) Partai politik merupakan wadah bagi warga negara yang memiliki pandangan, ideologi, atau tujuan politik yang sama untuk bersatu dan berupaya mencapai tujuan tersebut. Jadi, dalam proses pendidikan politik dan rekrutmen politik agar dilaksanakan dengan benar dan efektif sesuai dengan UU yang berlaku. Kemudian masih minimnya pemahaman masyarakat tentang sistem politik, kebijakan publik, dan pentingnya partisipasi politik. Oleh karena itu, partai politik dapat memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat khususnya mengenai isu perempuan dalam berpolitik.





- b) Pada dasarnya dalam pemilihan legislatif merupakan proses di mana warga negara memilih wakil mereka untuk duduk mewakili suaranya. Pemilihan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakil mereka yang mereka percaya akan mewakili kepentingan mereka secara efektif dalam proses pembuatan keputusan politik. Untuk itu, maka diperlukannya pemilihan bagi calon-calon legislatif perempuan yang benar-benar dipersiapkan dengan matang baik itu strategi untuk mendekati diri kepada masyarakat serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- c) Perlu adanya pertimbangan yang benar-benar dalam segmentasi di lapangan (masyarakat) agar target yang jelas dan terukur untuk meningkatkan keberagaman dalam partai dan memastikan pencapaian kuota yang ditetapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Conny R. Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Latuconsina, Nuraini. 2013. *Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*. Jurnal Populis Vol. 7 Nomor 2. Ambon: Universitas Pattimura.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.

Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

- Novianti, Cora Elly. 2013. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Jember: Universitas Moch.Sroedji.
- Panjaitan, Marojahan JS. 2019. *Fungsi Dan Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Politik Di Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.
- Solihin, Olih. 2018. *Implementasi Fungsi Artikulasi Dan Agregasi Pks Kota Bandung Pada Pemilu 2009*. Jurnal Agregasi Vol. 6 Nomor 1, Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Husada
- Sumartias, Suwardi dan Santi Susanti. 2017. *Fenomena Pemasaran Politik*. Jurnal Agregasi Vol. 3 Nomor 2, Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Triono. 2017. *Pemilu Dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Agregasi Vol. 3 Nomor 2, Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>. 273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri.
- <https://www.kemenpppa.go.id/>. Menteri Bintang Optimis Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Capai 30 Persen

#### PROFIL PENULIS

**Widdy Yuspita Widiyaningrum**, Lahir di Bandung, 12 Mei 1980. Ia menyelesaikan program Sarjana di Program Studi Ilmu Pemerintahan pada tahun 2003 di FISIP





Universitas Langlangbuana dan menyelesaikan program Magister pada tahun 2010 di FISIP Universitas Langlangbuana dengan fokus keilmuan dalam bidang Pemerintahan dan Hukum Pemerintahan Daerah. Saat ini penulis aktif sebagai pengajar di Universitas Bale Bandung, Universitas Terbuka, dan Universitas Bandung (STIA Bandung). Penulis juga menduduki jabatan structural sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung dari tahun 2018 sampai dengan sekarang.

**Fuziah Nur Alifah**, lahir di Bandung, 08 Mei 2001. Ia menyelesaikan program Sarjana di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung pada tahun 2023 dengan penelitian berjudul “Strategi *Marketing* Politik Dpd Partai Gerindra Jawa Barat Melalui Sayap Partai Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Dalam Peningkatan Rekrutmen Kontestan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2024”. Saat ini aktivitas yang ia lakukan menekuni wirausaha bisnis kuliner yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun.

